

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan suatu cara yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan suatu kepercayaan untuk mengelola daerah otonomnya sendiri, dan merupakan upaya untuk pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Setiap SKPD harus membuat laporan keuangan yang disertai dengan laporan kinerja (Damanik, 2017). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat juga didukung dengan adanya Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang kemudian direvisi dengan Pemendagri No. 59 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pedoman keuangan Daerah adalah suatu hal yang direplika menjadi suatu pedoman yang baru yang lebih banyak berorientasi pada prestasi kinerja yang ditetapkan dalam penyusunan APBD. Menurut Afrida, (2013), sektor publik hal yang dimaksud dalam kinerja adalah suatu capaian dalam melakukan tugas dan pelayanan kepada masyarakat dalam satu periode.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan didukung oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 yang juga mengatur mengenai pemerintah Daerah berorientasi pada desentralisasi, dimana pertanggungjawabannya atau akuntabilitas bersifat vertikal kepada pusat diubah horizontal kepada masyarakat dengan melalui DPRD. Menurut Anwar, (2018), adanya otonomi daerah maka semua hal diurus sendiri termasuk untuk penyusunan anggaran. Anggaran dalam akuntansi publik merupakan suatu

pertanggungjawaban mengenai rencana dan kegiatan serta aktivitas apa saja yang didanai oleh publik.

Muncul berbagai masalah jika SKPD tidak mampu menyerap anggaran dengan baik. Anwar, (2018) mengatakan bahwa anggaran yang baik adalah anggaran yang jelas dan mampu memudahkan individu untuk menyusun capaian anggaran. Menurut website resmi milik Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2018 kinerja pemkab Klaten dinilai masih kurang baik dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada masing-masing SKPD masih mendapatkan nilai C. Pemkab Klaten pada tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami kenaikan dengan mendapatkan nilai B, tetapi hal ini belum cukup maksimal jika dibandingkan dengan kabupaten sekitar seperti Yogyakarta yang telah mendapatkan nilai A.

Hal ini disebabkan banyak faktor, salah satu faktornya adalah penyerapan anggaran di Kabupaten Klaten masih kurang maksimal. Data dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Klaten tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat SILPA 2M lebih dengan persentase penyerapan anggarannya 78,21%. Anggaran yang dianggarkan pada tahun 2017 adalah sejumlah 10.670.097.000 namun realisasinya hanya 8.344.593.640. Hal ini dianggap masih kurang maksimal dalam penyerapan anggaran, maka perlunya dilakukan perbaikan dalam kinerja pemerintahannya.

Fenomena mengenai kinerja suatu satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) masih menarik untuk diteliti dikarenakan masih banyak SKPD yang belum maksimal dalam pengelolaan anggaran, terlebih dalam penyerapan anggarannya. Banyak SKPD masih belum bisa menggunakan anggaran lebih dari presentase yang telah ditetapkan oleh kabupaten atau kota yang terkait. Hal tersebut menjadikan kinerja suatu satuan kerja pemerintah daerah menjadi buruk karena berarti kegiatan dan rencana yang telah dirancang tidak berjalan sesuai dengan kenyataannya.

Kinerja suatu SKPD merupakan tolok ukur untuk mengetahui seberapa bagus kinerja pemerintah daerah, sedangkan baik atau buruknya kinerja tergantung seberapa jauh tercapainya suatu rencana atau aktivitas yang telah dianggarkan dalam mencapai tujuannya. Menurut Astini, Sulindawati, & Sinarwati, (2014), kinerja merupakan suatu tingkat pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan oleh instansi pemerintah diawal periode atau bahkan saat pemerintahaan itu dibangun.

Terdapat banyak faktor yang memengaruhi kinerja SKPD, faktor-faktor pada penelitian terdahulu yang ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja SKPD adalah (1) Akuntabilitas (Astini dkk., (2014)); Putra, (2013); Setiyawan & Safri, (2016)) , (2) Kejelasan Sasaran Anggaran (Astini dkk., (2014); Anwar, (2018)), (3) Sistem Pengendalian Internal (Wiguna, Wahyuni, & Atmadja, (2016) ; Anwar, (2018)), (4) Transparansi Purnama & Nadirsyah, (2016)), (5) Komitmen Organisasi(Wiguna dkk., (2016)), (6) Sistem Informasi Akuntansi

(Wiguna dkk., (2016)), (7) Desentralisasi (Afrida, (2013)), (8) Pengawasan Keuangan Daerah (Purnama & Nadirsyah, (2016)). Dari beberapa faktor tersebut peneliti fokus pada faktor Akuntabilitas, Sistem Pengendalian Internal. Variabel ini dipilih karena ketidakkonsistenan penelitian terdahulu.

Akuntabilitas menurut Undang-undang No.22 tahun 1999 mewajibkan setiap rencana dan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik karena publik yang berhak mengetahui dan rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan undang-undang. Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban atas kegiatan atau kinerja dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kepada masyarakat.

Pemegang kekuasaan memiliki kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan mengenai dana yang digunakan untuk terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan. Seperti yang dijelaskan oleh Putra, (2013), akuntabilitas merupakan suatu cara manajerial untuk meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah untuk masyarakat berupa pelaporan kegiatan dari proses awal hingga terlaksananya kegiatan. Hal ini akan membuat pemerintah daerah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dan rencana karena akan diawasi dan dinilai oleh masyarakat.

Akuntabilitas sejalan dengan Firman Allah dalam Hadis Riwayat Bukhari sebagai berikut :

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ. وَكُنتُمْ مَسئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya”.

Hadist tersebut menjelaskan mengenai pertanggungjawaban, dimana setiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Hal yang dapat diambil dari hadist tersebut adalah bahwa seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban, pertanggungjawaban bukan hanya kepada masyarakat namun kepada Allah SWT.

Terdapat beberapa penelitian yang menemukan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Setiyawan & Safri, (2016), Purnama & Nadirsyah, (2016) dan Adiwiryana, (2015). Namun demikian, Sunny, (2018) menemukan bahwa akuntabilitas publik tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja SKPD.

Sistem Pengendalian Internal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, merupakan suatu proses yang didasari oleh pemikiran manajemen untuk memberikan keyakinan yang layak dalam mencapai efektivitas, efisiensi dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang ada, dan untuk menyediakan suatu laporan keuangan yang andal. Menurut Narsih, (2016), pelaksanaan sistem pengendalian internal

seharusnya bertumpu pada keteguhan sistem pengendalian yang sebelumnya sudah ada dan sudah kokoh yang kemudian dilaksanakan oleh semua elemen dalam suatu organisasi tersebut pada semua aspek.

Kebutuhan setiap elemen dalam menjalankan suatu kegiatan agar kinerja di dalamnya berjalan dengan lancar dan maksimal adalah dengan melibatkan sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mengendalikan seseorang agar tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. pengendalian yang dilakukan bisa mulai dari awal sampai akhir kegiatan, ketika mampu melakukan pengendalian maka tidak akan terjadi kecurangan ataupun kebocoran. Hal ini berarti bahwa suatu kinerja dalam organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya.

Terdapat penelitian yang menemukan bahwa Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Pujiono, Sukarno, & Puspitasari, (2016) dan Wiguna dkk., (2016). Namun demikian, penelitian yang lain menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD, seperti pada penelitian Narsih, (2016) dan Sunny, (2018).

Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kinerja SKPD apabila sistem pengendalian internal berjalan dengan bagus, maka kegiatan dalam SKPD akan berjalan dengan lancar tanpa adanya kecurangan. Tetapi, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang

tidak konsisten. Sistem pengendalian internal yang baik belum tentu menghasilkan kinerja yang baik, karena sistem pengendalian internal merupakan sistem yang dijalankan oleh manusia, sehingga sistem akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh komitmen organisasi dari pelaku-pelaku dalam SKPD tersebut. Menurut Anwar, (2018), komitmen organisasi merupakan suatu dorongan yang muncul dari dalam individu untuk selalu mementingkan kepentingan organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi pada SKPD maka akan berusaha mematuhi prosedur atau pengendalian yang telah ditetapkan, dengan demikian tidak akan ada kecurangan yang terjadi.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja, seperti penelitian yang dilakukan oleh Anwar, (2018) dan Adi, Suardhika, & Putri, (2017). Namun terdapat penelitian yang dilakukan oleh Narsih, (2016) dan Sunny, (2018) yang mengatakan hubungan negatif antara komitmen organisasi dengan kinerja SKPD.

Peneliti menduga komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan antara sistem pengendalian internal terhadap kinerja SKPD. Alasan dugaan tersebut dikarenakan semakin organisasi tersebut atau pegawai memiliki rasa komit yang tinggi terhadap organisasi maka akan melakukan semaksimal mungkin agar tujuan dalam organisasi tercapai dan juga berusaha mematuhi prosedur atau pengendalian yang ditetapkan. Tujuan dalam organisasi dapat dicapai dengan menggunakan sistem

pengendalian internal. Pengendalian internal yang dilakukan dan didukung dengan adanya komitmen organisasi akan membuat suatu kinerja dalam SKPD tersebut berjalan lancar sesuai dengan tujuannya.

Pentingnya penelitian ini dilakukan karena masih banyak SKPD di Klaten yang belum maksimal dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan juga karena terdapat ketidakkonsistenan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Sistem pengendalian Internal, Terhadap Kinerja SKPD dengan Komitmen Organisasi sebagai Moderasi (studi pada Pemerintah Kabupaten Klaten)”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Astini dkk., (2014) dengan judul “Akuntabilitas Publik, kejelasan sasaran Anggaran, dan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja SKPD”. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penelitimenambahkan variabel moderasi yaitu komitmen organisasi karena diduga dapat menghubungkan ketidakkonsistenan pengaruh sistem pengendalian internal dengan kinerja SKPD.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian, maka rumusan masalah dalam menjelaskan penelitian ini adalah :

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah?
3. Apakah Komitmen Organisasi mampu memperkuat hubungan antara Sistem pengendalian Internal dengan Kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Komitmen Organisasi terhadap hubungan antara Sistem Pengendalian Internal dengan Kinerja satuan Kerja Perangkat Daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan untuk kemajuan dalam pengembangan ilmu akuntansi.

- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kinerja Satuan Kerja Perangkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki Sistem Pengendalian Internal dan Akuntabilitas dalam memengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah terutama pada daerah dilokasi penelitian. Penelitian ini juga diharapkan memberikan solusi apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang harus diambil oleh Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD di Kabupaten Klaten.